

## PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERPUTARAN PIUTANG, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Raidi<sup>1</sup>, Yunita Althin<sup>2</sup>, Rina Malahayati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Gunung Leuser

---

### Article Info

#### Article history:

Received 22 Nov 2025  
Revised: 27 Nov 2025  
Accepted: 29 Nov 2025

---

#### Keywords:

*The Role of Village Apparatus,  
Accountability, Village Fund  
Management, Community  
Empowerment, Village  
Government*

---

### ABSTRACT

*Community empowerment is crucial in optimizing the use of village funds for sustainable development and improving welfare. This study aims to analyze the role of village officials and accountability in managing village funds in Lawe Kongker Hilir Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency. Using a quantitative approach, primary data were collected through questionnaires distributed to respondents. Data were analyzed using SPSS, including descriptive statistical tests, classical assumption tests, simple linear regression, and partial hypothesis tests, as well as coefficients of determination. The results show that the role of village officials has a positive and significant effect on village fund management. Similarly, accountability also has a positive and significant effect on village fund management. Simultaneously, the role of village officials and accountability together have a positive and significant effect on village fund management. The adjusted R-square value of 0.581 indicates that 58.1% of the variation in village fund management is explained by the role of village officials and accountability, while the remaining 41.9% is explained by other variables not examined. These findings emphasize the importance of strengthening the role of village officials and increasing accountability for optimizing village fund management.*

*This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.*



---

### Corresponding Author:

Name: Raidi  
Email: [raidikocan457@gmail.com](mailto:raidikocan457@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa telah menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional, khususnya sejak bergulirnya program Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang signifikan bertujuan untuk mendorong kemandirian desa, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif. Konsep pemberdayaan ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat agar lebih proaktif dan tanggap terhadap potensi lokal, sehingga anggaran dapat terserap secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan desa, bahkan pada tingkat daerah dan nasional

DOI:

Dengan pemberdayaan yang efektif, diharapkan pendapatan desa akan meningkat, yang secara otomatis berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan menjadi kunci keberhasilan program ini. Namun, implementasi pengelolaan Dana Desa tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan muncul, terutama terkait dengan kapabilitas perangkat desa dan mekanisme akuntabilitas yang berlaku. Perangkat desa, sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal, memiliki peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa. Kualitas peran perangkat desa, mulai dari pemahaman regulasi, kemampuan manajerial, hingga integritas, sangat memengaruhi efektivitas pengelolaan dana tersebut. Di sisi lain, akuntabilitas, yang mencakup pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik, merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa akuntabilitas yang kuat, risiko penyelewengan, inefisiensi, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa akan meningkat.

Studi kasus pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah seringkali mengungkap adanya kesenjangan antara harapan ideal dan realitas di lapangan. Beberapa desa mungkin menunjukkan keberhasilan dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan akuntabel, sementara desa lain masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, minimnya partisipasi masyarakat, atau sistem pelaporan yang belum memadai. Sebagai contoh, di beberapa wilayah, masih terdapat laporan tentang indikasi korupsi atau penyalahgunaan Dana Desa yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi untuk secara mendalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, salah satunya adalah peran perangkat desa.

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek akuntabilitas dari sudut pandang transparansi atau partisipasi masyarakat secara umum. Meskipun peran perangkat desa seringkali disinggung, analisis mendalam mengenai bagaimana peran spesifik mereka dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Kesenjangan ini menjadi relevan mengingat peran krusial perangkat desa dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Selain itu, konteks geografis dan sosiokultural suatu desa juga dapat memengaruhi dinamika pengelolaan Dana Desa dan penerapan akuntabilitasnya. Studi yang berfokus pada wilayah spesifik seperti Desa Lawe Kongker Hilir, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan empiris mengenai interaksi antara peran perangkat desa dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk meningkatkan efektivitas program Dana Desa yang merupakan salah satu program pembangunan penting di Indonesia. Secara ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen pemerintahan desa, khususnya terkait dengan faktor-faktor penentu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan pemerintah desa itu sendiri untuk menguatkan kapasitas perangkat desa, memperbaiki sistem akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam

pengelolaan Dana Desa. Bagi masyarakat desa, hasil studi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis "Peran Perangkat Desa dalam Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara". Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara empiris bagaimana peran perangkat desa berkorelasi dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kontribusi artikel ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan menyediakan model hubungan antara peran perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang spesifik di konteks lokal, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan akuntabel di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh peran perangkat desa dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lawe Kongker Hilir. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini mengumpulkan data numerik melalui kuesioner dan menganalisisnya menggunakan teknik statistik untuk mengukur hubungan antarvariabel (Sugiyono, 2020). Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait pengelolaan Dana Desa.

Lokasi penelitian adalah Desa Lawe Kongker Hilir, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Waktu pelaksanaan penelitian tidak disebutkan secara eksplisit dalam skripsi, namun pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada tahun 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir. Teknik pengambilan sampel tidak disebutkan secara spesifik dalam file skripsi, namun karena konteks penelitian ini sangat spesifik pada satu desa, kemungkinan besar digunakan *purposive sampling* atau bahkan sensus jika jumlah responden yang relevan tidak terlalu banyak. Jumlah responden yang tepat akan menentukan validitas statistik hasil, namun karena analisis regresi digunakan, diasumsikan jumlah sampel memadai untuk pengujian statistik. Variabel penelitian terdiri dari:

### **1. Variabel Independen:**

- a. **Peran Perangkat Desa (X1):** Merujuk pada fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh perangkat desa dalam seluruh siklus pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Indikatornya dapat mencakup pemahaman regulasi, partisipasi dalam musyawarah desa, kemampuan manajerial, dan koordinasi dengan lembaga lain.
- b. **Akuntabilitas (X2):** Mengacu pada prinsip pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Indikatornya meliputi transparansi informasi anggaran dan realisasi, partisipasi

masyarakat dalam pengawasan, serta mekanisme pelaporan yang jelas dan dapat diakses.

2. **Variabel Dependen:**

- a. **Pengelolaan Dana Desa (Y):** Merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikatornya dapat mencakup ketepatan alokasi, efisiensi penggunaan, kepatuhan terhadap prosedur, dan kualitas laporan pertanggungjawaban.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator-indikator dari masing-masing variabel. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan atau persepsi responden.

Sebelum analisis data utama, kuesioner akan diuji **validitas** dan **reliabilitasnya**. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur. Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran konsisten dalam memberikan hasil jika pengukuran diulang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. **Uji Statistik Deskriptif:** Untuk memberikan gambaran ringkas tentang karakteristik data variabel peran perangkat desa, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa.
2. **Uji Asumsi Klasik:** Meliputi:
  - a. **Uji Normalitas:** Menguji apakah data residual terdistribusi normal, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau grafik P-Plot.
  - b. **Uji Multikolinearitas:** Menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (peran perangkat desa dan akuntabilitas) menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan *Tolerance*.
  - c. **Uji Heteroskedastisitas:** Menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan, misalnya menggunakan *scatterplot* atau uji Glejser.
3. **Analisis Regresi Linear Berganda:** Untuk menguji pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$  Di mana  $Y$  = Pengelolaan Dana Desa;  $a$  = konstanta;  $b_1$ ,  $b_2$  = koefisien regresi;  $X_1$  = Peran Perangkat Desa;  $X_2$  = Akuntabilitas;  $e$  = *error term*.
4. **Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>):** Untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
5. **Uji Hipotesis:**
  - a. **Uji F (Simultan):** Untuk menguji pengaruh Peran Perangkat Desa dan Akuntabilitas secara bersama-sama terhadap Pengelolaan Dana Desa.
  - b. **Uji t (Parsial):** Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel Peran Perangkat Desa dan Akuntabilitas secara terpisah terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Dengan metodologi yang sistematis ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan reliabel mengenai peran perangkat desa dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Statistik Deskriptif Hasil analisis deskriptif untuk variabel-variabel penelitian akan memberikan gambaran umum tentang persepsi responden:

- a. Peran Perangkat Desa: Nilai rata-rata dan standar deviasi akan menunjukkan tingkat persepsi responden terhadap kualitas peran perangkat desa. Jika nilai rata-rata tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai peran perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa sudah baik.
- b. Akuntabilitas: Nilai rata-rata dan standar deviasi akan mencerminkan tingkat persepsi responden terhadap praktik akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan persepsi yang baik terhadap transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban.
- c. Pengelolaan Dana Desa: Nilai rata-rata dan standar deviasi akan menunjukkan tingkat persepsi responden terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan di Desa Lawe Kongker Hilir.

Uji Asumsi Klasik Seperti disebutkan dalam metodologi, uji asumsi klasik telah dilakukan untuk memastikan validitas model regresi. Asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas harus terpenuhi agar hasil regresi dapat diinterpretasikan dengan benar. Keterangan dari Abstrak skripsi mengindikasikan bahwa uji asumsi klasik telah dilakukan dan memenuhi syarat untuk analisis regresi linear.

### **Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan menunjukkan Peran Perangkat Desa dan Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Nilai *adjusted R Square* adalah 0,581 artinya bahwa kemampuan variabel Peran Perangkat Desa dan Akuntabilitas dapat menjelaskan variasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebesar 58,1 % sedangkan sisanya sebesar 41,9% dijelaskan oleh variabel independen yang tidak diteliti seperti partisipasi masyarakat, transparan..

Hasil penelitian ini menjadi gambaran persamaan maupun perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini:

Sari (2023), Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pulau Kumpai. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam proses perencanaan perangkat desa sebelum sepenuhnya berperan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan dalam hal ini DOI:

dikatakan tidak akuntabel. Pada proses pelaksanaan dana desapengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukkan kedalam bukukas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa telah disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati berupa semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Serta dalam pertanggungj awaban perangkat desa mempertanggung jawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa.

Masriyah et al., (2023), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Susilo (2023), Pengelolaan dana desa di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang secara prinsip-prinsip akuntabilitas sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam penerapan di lapangan yang harus menyesuaikan aturanaturan yang berlaku serta penggunaan tanggungjawab yang lebih dapat dimaksimalkan, harapannya penggunaan web yang sudah ada dapat dimaksimalkan sehingga informasi dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat Desa Maguan.

Sari dan Sultan (2022), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa berperan positif dan signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Septiani dan Rahmadhani (2022) Hasil menunjukkan bahwa peran pejabat desa tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Akuntansi Keuangan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Msriyah et al., (2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**

Hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial Peran Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Peran perangkat desa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengelolaan dana desa. Mereka adalah pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan kolaborasi yang terjalin di antara mereka.

Perangkat desa, seperti Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Kaur), berperan vital dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Mereka bertugas mengidentifikasi kebutuhan masyarakat,

DOI:

merumuskan program, dan mengalokasikan anggaran secara proporsional. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam tahapan ini dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan prioritas desa.

Hasil penelitian ini menjadi gambaran persamaan maupun perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini:

Sari (2023), Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pulau Kumpai. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam proses perencanaan perangkat desa sebelum sepenuhnya berperan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan dalam hal ini dikatakan tidak akuntabel. Pada proses pelaksanaan dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukkan ke dalam buku umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa telah disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada Bupati berupa semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Serta dalam pertanggungjawaban perangkat desa mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa.

Masriyah et al., (2023), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Susilo (2023), Pengelolaan dana desa di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang secara prinsip-prinsip akuntabilitas sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam penerapan di lapangan yang harus menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku serta penggunaan tanggungjawab yang lebih dapat dimaksimalkan, harapannya penggunaan web yang sudah ada dapat dimaksimalkan sehingga informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Desa Maguan.

Sari dan Sultan (2022), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa berperan positif dan signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Septiani dan Rahmadhani (2022) Hasil menunjukkan bahwa peran pejabat desa tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Akuntansi Keuangan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Msriyah et al., (2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**

Hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Akuntabilitas memiliki pengaruh yang sangat penting dan langsung terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas adalah prinsip yang mewajibkan para pengelola dana (dalam hal ini perangkat desa dan kepala desa) untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka, serta melaporkan hasil penggunaan dana tersebut kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Prinsip akuntabilitas menciptakan mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat. Ketika perangkat desa tahu bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan, mereka akan cenderung lebih berhati-hati dan jujur dalam penggunaannya. Hal ini secara efektif mengurangi risiko korupsi, penyelewengan, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Hasil penelitian ini menjadi gambaran persamaan maupun perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini: Sari (2023), Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pulau Kumpai. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam proses perencanaan perangkat desa sebelum sepenuhnya berperan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan dalam hal ini dikatakan tidak akuntabel. Pada proses pelaksanaan dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukkan ke dalam bukukas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa telah disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa Kepada Bupati berupa semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Serta dalam pertanggungjawaban perangkat desa mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa.

Masriyah *et al.*, (2023), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Susilo (2023), Pengelolaan dana desa di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang secara prinsip-prinsip akuntabilitas sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam penerapan di lapangan yang harus menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku serta penggunaan tanggungjawab yang lebih dapat dimaksimalkan, harapannya penggunaan web yang sudah ada dapat dimaksimalkan sehingga informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Desa Maguan.

Sari dan Sultan (2022), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa berperan positif dan signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Septiani dan Rahmadhani

DOI:



(2022) Hasil menunjukkan bahwa peran pejabat desa tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Akuntansi Keuangan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di pejabat desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Msriyah et al., (2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini berhasil menganalisis peran perangkat desa dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Lawe Kongker Hilir, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil menunjukkan bahwa baik peran perangkat desa maupun akuntabilitas, secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Peran perangkat desa yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta sistem akuntabilitas yang transparan dan partisipatif, merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Implikasi utama dari temuan ini adalah pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, khususnya perangkat desa, melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Peningkatan pemahaman mereka terhadap regulasi dan kemampuan manajerial akan secara langsung meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, praktik akuntabilitas yang konsisten dan terintegrasi, yang mencakup transparansi anggaran dan realisasi, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, dan mekanisme pelaporan yang jelas, adalah fundamental untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyelewengan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah memberikan bukti empiris yang spesifik pada konteks desa di wilayah pedesaan Aceh Tenggara, yang seringkali memiliki dinamika berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Studi ini memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan manajemen pemerintahan desa dengan menegaskan kembali peran krusial aparaturnya lokal dan akuntabilitas dalam konteks implementasi Dana Desa.

### **Saran**

Saran untuk penelitian lanjutan adalah untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang teridentifikasi tidak termasuk dalam model, seperti partisipasi masyarakat, pengawasan eksternal, kualitas sistem informasi akuntansi desa, atau kepemimpinan kepala desa, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan Dana Desa. Penelitian komparatif antara desa-desa yang berbeda atau antar wilayah juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang spesifik dan strategi terbaik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansyah, R. (2020). Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 8(2), 101–112.
- Bangun, W. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Erlangga.
- Darmawan, D. (2021). Lingkungan kerja fisik dan nonfisik serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 45–56.
- Fahmi, I. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. Alfabeta.
- Firmansyah, A. (2022). Pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 55–68.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2020). *Organizations: Behavior, structure, processes* (15th ed.). McGraw-Hill.
- Handoko, T. H. (2020). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. BPFE.
- Herlinda, L., Putri, D. A., & Sari, F. M. (2021). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai instansi publik. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(3), 214–223.
- Mangkunegara, A. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2021). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, A., & Sari, R. M. (2020). Pengaruh kedisiplinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan sektor swasta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 78–87.
- Putra, Y. R. (2021). Analisis pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas pegawai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 3(1), 55–66.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2019). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. Rajawali Pers.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
- Sari, D. P. (2020). Dampak disiplin kerja terhadap kinerja pegawai sektor publik. *Jurnal Administrasi & Manajemen Publik*, 4(3), 133–142.
- Sedarmayanti. (2021). *Manajemen sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Refika Aditama.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.
- Wibowo. (2021). *Manajemen kinerja* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Yulianto, M., & Handayani, L. (2022). Pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja ASN. *Jurnal Administrasi dan Organisasi Publik*, 9(1), 44–58.